

ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Sahala Purba¹⁾, Heri Imanuel Nadeak²⁾, Elizabeth Siregar³⁾, Nia Tabita Damanik⁴⁾, Dian Herdeliani Purba⁵⁾

^{1),2),3),4),5)}Fakultas Ekonomi dan Universitas Methodist Indonesia Medan

e-mail:

sahala824@gmail.com, herinadeak51@gmail.com, elizabethsiregar07@gmail.com, niadamanik2112@gmail.com
dianherdelianipurba@gmail.com

ABSTRAK

Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran 7,35%, tingkat jumlah ibu hamil 40.088 jiwa, tingkat kemiskinan 4,30%, tingkat pendidikan 9,81%, tingkat umur harapan hidup 71,32%, tingkat pertumbuhan penduduk 2.026.558 jiwa yang terjadi pada tahun 2013-2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Deli Serdang periode 2013-2022. Penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah, ditinjau dari beberapa rasio yaitu: rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, dan rasio derajat kontribusi BUMD. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rasio kemandirian Deli Serdang 30,18%, tergolong rendah sekali dengan model koneksi konstruktif. (2) Rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 74,8%, tergolong sedang. (3) Rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 21,90%, tergolong rendah. (4) Rasio efektivitas PAD Deli Serdang tergolong tidak efektif karena rasionya 76,25%. (5) Rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien, sebesar 4,35%. (6) Rasio efektivitas pajak daerah Deli Serdang sebesar 73,86% tergolong tidak efektif. (7) Rasio efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien senilai 3,96%. (8) Rasio derajat kontribusi BUMD tergolong rendah karena memiliki nilai sebesar 2,74%. Adapun penelitian ini adalah untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan PAD, dan kontribusi BUMD.

Kata kunci : *Analisis Informasi Finansial, Efisiensi Rasio PAD, Kinerja financial, Pemerintah kabupaten.*

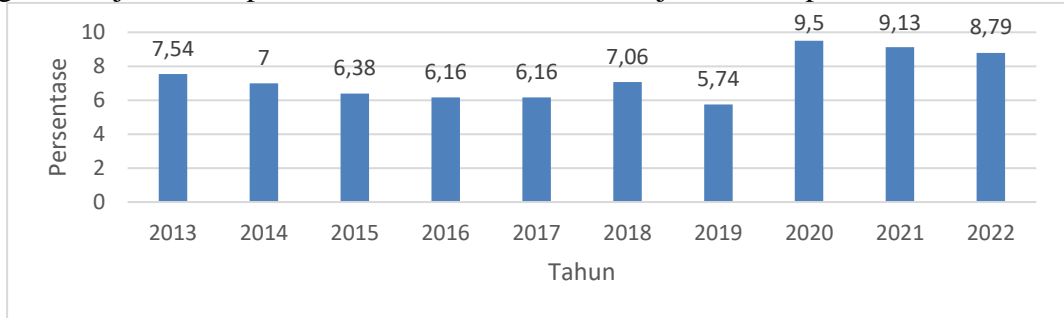
ABSTRACT

The phenomenon in this study is the unemployment rate of 7.35%, the rate of the number of pregnant mothers 40.088 people, the disability rate of 4.30%, the level of education 9.81%, the life expectancy rate of 71.32%, the population growth rate of 2.026.558 people that occurred in 2013-2022. The study aims to analyze the financial performance of the Government of Deli Serdang in the period 2013-2022. The research on the financial performance of local governments is reviewed from several ratios, namely: independence ratio, regional financial dependency ratio; fiscal decentralization ratios; effectiveness ratios PAD; efficiency ratio PAD, efficiency ratios of regional taxation, regional tax efficiency rate, and BUMD contribution ratios. The results of the research show: (1) Independence ratios Deli Serdang 30,18%, belong very low with the constructive connectivity model. (2) Dependency ratios for regional finance of 74.8% belong moderately. (3) Effectiveness ratio of fiscal decentralization degrees of 21.90% belongs to low. (4) PAD Deli serdang contribution ratio is ineffective because of its ratio 76.25 (5)%. Efficiency ratius PAD serdung is very efficient, of 4.35%. (6) Effective ratios tax delegation district of 73.86% Belongings are inefficient. (7) Tax ratios have the highest contribution value in the region, with a rate of 3.74%.

Keywords:. *Financial Information Analysis, PAD efficiency ratio, financial performance, district government.*

1. Pendahuluan

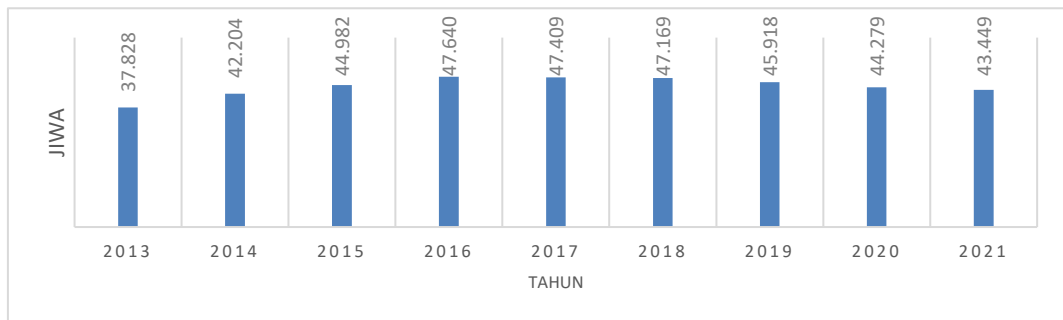
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bahwa dalam Kabupaten Deli Serdang ada masalah pengangguran, jumlah ibu hamil kekurangan zat besi, kemiskinan, pendidikan, umur harapan hidup, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2013 adalah 7,54%, meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2020, dan turun menjadi 8,79% pada tahun 2022 .[1]



Sumber:(bps.go.id, 2024)

Gambar 1 Tingkat Pengangguran pada tahun 2013-2022

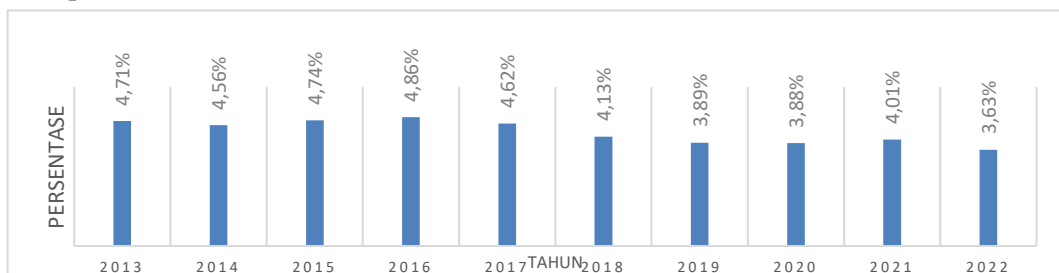
Menurut [2] stunting merupakan kelainan yang terjadi pada saat anak berkembang dan bertumbuh, disebabkan oleh defisiensi gizi kronis dan infeksi berulang, yang memiliki tanda dengan tinggi badan atau panjang badan di bawah rata-rata. Penelitian ini menunjukkan bahwa asupan zat besi merupakan faktor penting dalam perkembangan anak. Penting untuk meningkatkan asupan zat besi pada balita melalui fortifikasi makanan, pemberian formula tinggi zat besi dan makanan kaya zat besi. [3].



Sumber:(bps.go.id, 2024)

Gambar 2 Tingkat Jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi tahun 2013-2022

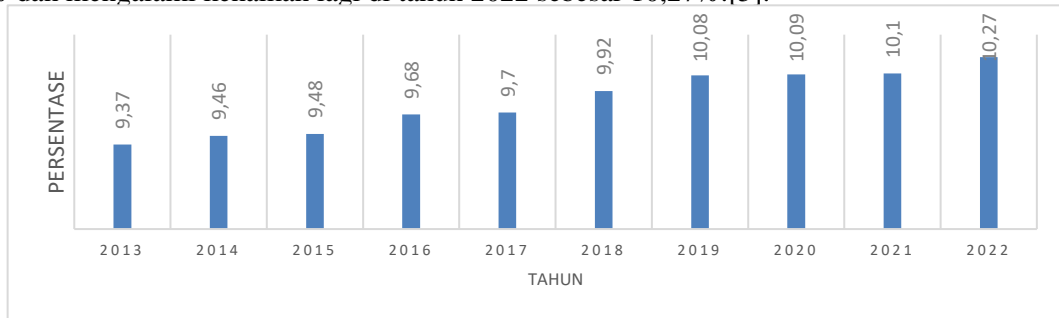
Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu menghadapi keterbatasan dalam kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin (yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Deli Serdang mencapai 4,71%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 4,86%. Namun di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,63% [4].



Sumber:(bps.go.id, 2024)

Gambar 3 Tingkat Kemiskinan pada tahun 2013-2022

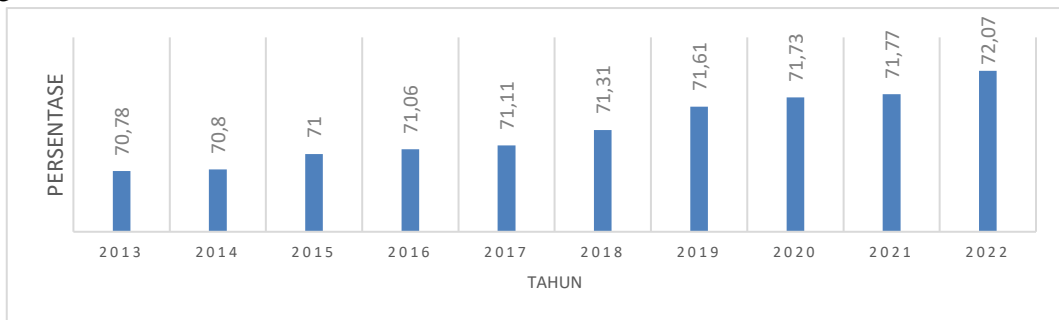
Faktor penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah mengacu pada total tahun rata-rata yang dihabiskan oleh individu berusia 15 tahun ke atas dalam menuntaskan pendidikan mereka. Pada daerah Deli Serdang, rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas memiliki Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 10,27 tahun yang mana hal tersebut setara dengan Sekolah Menengah Umum kelas I pada tahun 2022. Berdasarkan tabel diagram dibawah ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan RLS di daerah Deli Serdang selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2013-2020. Tahun 2021 RLS mengalami penurunan sebesar 10,1% dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 sebesar 10,27%. [5].



Sumber: (bps.go.id, 2024)

Gambar 4 Tingkat Pendidikan pada tahun 2013-2022

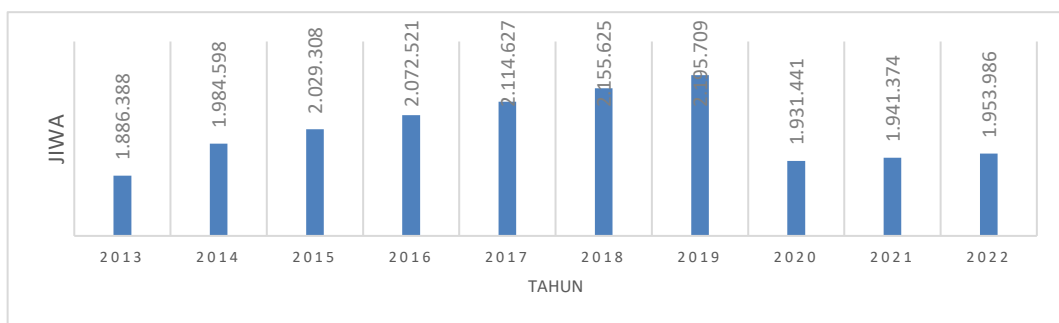
Parameter penting dalam mengevaluasi kondisi kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dari lahir hingga lanjut usia. Grafik Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel grafik berikut.



Sumber: (bps.go.id, 2024)

Gambar 5 Tingkat Umur Harapan Hidup pada tahun 2013-2022

Pada tahun 2013, tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Deli Serdang adalah 1.886.388 jiwa, yang meningkat menjadi 2.195.709 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk mencapai 1.931.441 jiwa dan meningkat menjadi 1.941.374 jiwa pada tahun 2021, termasuk penduduk dengan status tempat tinggal tidak tetap. Kabupaten Deli Serdang menduduki peringkat kedua terbesar di Sumatera Utara setelah Kota Medan [6].



Sumber: (bps.go.id, 2024)

Gambar 6 Tingkat Pertumbuhan penduduk pada tahun 2013-2022

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma & Susanto, 2010). Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Total PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini merupakan perbandingan dari jumlah pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah atas total penerimaan daerah (Widodo, 2021). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ukuran Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio total PAD terhadap pendapatan daerah (Bisma & Susanto, 2010). Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Widodo, 2021). Rasio Efektivitas PAD = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efisiensi menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Maulina, 2020).

$$\text{Rasio Keefisienan PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Pajak daerah

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Puspitasari & Rohman, 2014). Rasio Efektivitas Pajak Daerah = $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$

Rasio Efisiensi Pajak daerah

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah (Puspitasari & Rohman, 2014).

$$\text{Rasio Keefisienan Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba BUMD dengan realisasi PAD yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan negara dalam mendukung pendapatan daerah (Widodo, 2021). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. Metode Penelitian

Penerapan metode deskriptif kuantitatif digunakan pada penelitian ini dalam memeriksa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK Sumatera Utara selama rentang waktu 2013-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, diikuti dengan pengukuran skala terhadap data keuangan yang diperoleh. Setelah itu, data tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang relevan dan dijabarkan dengan menggunakan kalimat dan ilustrasi untuk menjelaskan kinerja

keuangan. Analisis informasi finansial dimanfaatkan untuk memahami isu-isu dan peluang yang terdapat dalam data keuangan tersebut [7].

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Otonomi(%)	Kontribusi PAD	Model koneksi
0% - 25%	Sangat Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah Sekali	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Parsipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Semakin tinggi porsinya, semakin besar otonomi yang dimiliki daerah tersebut [1]

Rasio ketergantungan keuangan daerah

Standar	
Rasio	Kriteria
0% - 25%	Rendah Sekali
26% - 50%	Rendah
51% - 75%	Sedang
76% - 100%	Tinggi

Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap keuangan pusat (pendapatan transfer) [8].

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Standar	
Rasio	Kriteria
0% - 10%	Rendah Sekali
11%- 30%	Rendah
31% – 40%	Cukup
41% – 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Semakin tinggi kontribusi terhadap PAD maka semakin besar pula kemampuan pengelola daerah dalam melaksanakan desentralisasi [8].

Rasio Efektivitas PAD

Standar	
Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan moneter
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
90-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah(PAD) maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD)sesuai dengan anggarannya [8].

Rasio Efisiensi PAD

Standar	
Keefisienan (%)	Kemampuan Finansial
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien

31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien
Semakin besar ukurannya maka semakin besar pula kemampuan penyelenggara daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD sesuai anggarannya [1].	

Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Standar	
Rasio Efektifitas (%)	Kemampuan Finansial
<75	Tidak Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif
Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD untuk memenuhi anggarannya [1].	

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Standar	
Keefisienan (%)	Kemampuan Finansial
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien
Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dikatakan lebih baik/efisien jika kurang dari atau sama dengan 10% [8].	

4. Hasil dan Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Finansial Daerah bertujuan dalam mengukur kinerja perealisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan pendapatan transfer yang dihasilkan Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya. Jika rasio ini kecil berarti realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan sangat rendah dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selalu mengharapkan Pusat untuk menanggung biaya pemerintahan dan operasional Kabupaten Deli Serdang [9].

Tabel 1. Rasio Kemandirian

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Penghasilan Transfer (Rp)	Rasio	Kontribusi PAD	Model Koneksi
2013	328.348.147.362,35	1.756.113.110.433,00	18,70%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2014	433.885.507.125,82	2.007.514.826.334,00	21,61%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2015	515.293.681.488,42	2.251.862.365.570,00	22,88%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2016	573.010.351.004,96	2.539.333.029.362,00	22,57%	Sangat rendah sekali	Instruktif
2017	849.286.151.151,13	2.476.079.377.351,00	34,30%	Rendah sekali	Konstruktif
2018	729.648.594.488,68	2.478.181.849.298,00	29,44%	Rendah sekali	Konstruktif
2019	825.375.281.296,75	2.279.470.240.722,00	36,21%	Rendah sekali	Konstruktif
2020	809.719.829.264,82	2.049.562.028.316,00	39,51%	Rendah sekali	Konstruktif
2021	926.137.759.153,33	2.451.655.133.476,00	37,78%	Rendah sekali	Konstruktif
2022	1.041.732.670.188,21	2.687.662.779.160,00	38,76%	Rendah sekali	Konstruktif
Rata-Rata	703.243.797.252,45	2.297.743.474.002,20	30,18%	Rendah sekali	Konstruktif

Sumber: [10]

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan dengan membandingkan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah. Dari tabel 4.2, terlihat bahwa ketergantungan keuangan Kabupaten Deli Serdang pada 2013-2016 berada pada kriteria tinggi, sedangkan pada 2017-2022 berada pada kriteria sedang. Rasio ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 83,77% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 61,45%.

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Penghasilan Daerah (Rp)	Rasio	Ketergantungan
2013	1.756.113.110.433,00	2.096.336.073.545,35	83,77%	Tinggi
2014	2.007.514.826.334,00	2.450.204.561.759,82	81,93%	Tinggi
2015	2.251.862.365.570,00	2.782.141.454.678,42	80,94%	Tinggi
2016	2.539.333.029.362,00	3.112.343.380.366,96	81,59%	Tinggi
2017	2.476.079.377.351,00	3.332.039.840.502,13	74,31%	Sedang
2018	2.478.181.849.298,00	3.363.304.583.385,75	73,68%	Sedang
2019	2.279.470.240.722,00	3.573.056.389.618,75	63,80%	Sedang
2020	2.049.562.028.316,00	3.335.349.826.580,82	61,45%	Sedang
2021	2.451.655.133.476,00	3.539.280.627.629,33	69,27%	Sedang
2022	2.687.662.779.160,00	3.731.018.449.348,21	72,04%	Sedang
Rata-Rata	2.297.743.474.002,20	3.131.507.518.741,55	74,28%	Sedang

Sumber: [10]

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam menghitung derajat sebaran pajak dalam menghasilkan pendapatan asli daerah menggunakan metode mengukur pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022, sebesar 27,92% dengan indikator rendah. Dan yang paling rendah pada tahun 2013, sebesar 15,66% dengan indikator rendah

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Penghasilan Asli Daerah(Rp)	Penghasilan Daerah(Rp)	Rasio	Indikator
2013	328.348.147.362,35	2.096.336.073.545,35	15,66%	Rendah
2014	433.885.507.125,82	2.450.204.561.759,82	17,71%	Rendah
2015	515.293.681.488,42	2.782.141.454.678,42	18,52%	Rendah
2016	573.010.351.004,96	3.112.343.380.366,96	18,41%	Rendah
2017	849.286.151.151,13	3.332.039.840.502,13	25,49%	Rendah
2018	729.648.594.488,68	3.363.304.583.385,75	21,69%	Rendah
2019	825.375.281.296,75	3.573.056.389.618,75	23,10%	Rendah
2020	809.719.829.264,82	3.335.349.826.580,82	24,28%	Rendah
2021	926.137.759.153,33	3.539.280.627.629,33	26,17%	Rendah
2022	1.041.732.670.188,21	3.731.018.449.348,21	27,92%	Rendah
Rata-Rata	703.243.797.252,45	3.131.507.518.741,55	21,90%	Rendah

Sumber: [10]

Rasio Efektivitas PAD

Dari hasil penelitian rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Deli Serdang yang tidak efektif terjadi sebanyak 5 tahun (2013,2019,2020,2021,2022), dan yang kurang efektif terjadi sebanyak 4 tahun (2014,2015,2016,2018), dan yang cukup efektif terjadi hanya 1 tahun (2018). Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Deli Serdang yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yang besar rasionya 93,06% dengan kemampuan moneter cukup efektif. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah yang paling rendah terjadi pada tahun 2021 dengan besar rasionya 60,94% dengan kategori kemampuan moneter tidak efektif.

Tabel 4 Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio	Kemampuan Moneter
2013	328.348.147.362,35	465.000.000.000,00	70,61%	Tidak Efektif
2014	433.885.507.125,82	566.137.619.000,00	76,64%	Kurang Efektif
2015	515.293.681.488,42	638.538.138.500,00	80,70%	Kurang Efektif

2016	573.010.351.004,96	649.175.754.000,00	88,27%	Kurang Efektif
2017	849.286.151.151,13	912.593.775.000,00	93,06%	Cukup Efektif
2018	729.648.594.488,68	925.522.525.079,00	78,84%	KurangEfektif
2019	825.375.281.296,75	1.167.794.977.442,00	70,68%	Tidak Efektif
2020	809.719.829.264,82	1.100.498.262.974,00	73,58%	Tidak Efektif
2021	926.137.759.153,33	1.519.793.939.731,00	60,94%	Tidak Efektif
2022	1.041.732.670.188,21	1.504.964.363.832,00	69,22%	Tidak Efektif
Rata-rata	703.243.797.252,45	945.001.935.555,80	76,25%	Tidak Efektif

Sumber:[10]

Rasio Efisiensi PAD

Perhitungan rasio ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan PAD yang berhasil direalisasikan [7]. Dari hasil pengamatan, kemampuan finansial rasio PAD (2013-2022) kabupaten Deli Serdang yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang besar rasionya 5,93%, dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 yang besar rasionya 2,60%.

Tabel 5 Rasio Efisiensi PAD

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio	Kemampuan Finansial
2013	-	305.271.905.329,59	-	-
2014	10.206.781.875,00	391.956.019.105,61	2,60%	Sangat Efektif
2015	29.226.996.437,00	492.734.033.232,51	5,93%	Sangat Efektif
2016	23.065.607.801,00	491.288.438.679,16	4,69%	Sangat Efektif
2017	27.561.885.501,00	613.301.179.494,03	4,49%	Sangat Efektif
2018	24.018.545.399,00	597.124.263.824,97	4,02%	Sangat Efektif
2019	-	686.745.816.813,00	-	-
2020	-	643.960.297.066,77	-	-
2021	-	704.859.912.826,00	-	-
2022	-	796.879.743.645,40	-	-
Rata-rata	22.815.963.402,60	572.412.161.001,70	4,35%	Sangat Efektif

Sumber: [10]

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Analisis rasio efektivitas kebijakan fiskal daerah meliputi analisis kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah dengan membandingkan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah dan anggaran fiskal daerah[9] . Dari hasil analisis rasio pada table 4.6 rata-Rata rasio efektivitas pajak daerah (Deli Serdang) sebesar 73,86% yang berada pada kaegori tidak efektif.

Tabel 6 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Fiskus Wilayah	Anggaran Fiskus Wilayah	Rasio	Kemampuan Finansial
2013	253.251.664.618,76	364.720.000.000,00	69,44%	Tidak Efektif
2014	302.207.051.218,57	418.680.000.000,00	72,18%	Tidak Efektif
2015	369.060.712.118,63	463.126.092.000,00	79,69%	Kurang Efektif
2016	426.484.851.696,80	487.186.468.000,00	87,54%	Kurang Efektif
2017	553.610.032.994,03	582.022.000.000,00	95,12%	Cukup Efektif
2018	558.329.598.200,97	720.622.000.000,00	77,48%	Tidak Efektif
2019	652.563.113.786,75	945.382.220.000,00	69,03%	Tidak Efektif
2020	596.316.675.898,77	881.671.250.000,00	67,63%	Tidak Efektif
2021	672.462.837.506,00	1.188.522.247.055,00	56,58%	Tidak Efektif
2022	767.658.224.719,40	1.201.597.247.055,00	63,89%	Tidak Efektif
Rata-rata	515.194.476.275,87	725.352.952.411,00	73,86%	Tidak Efektif

Sumber: [10]

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Hasil penelahaan menunjukkan bahwa efisiensi PAD mengalami fluktuasi yang cukup stabil selama periode tahun 2013-2020, mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, skala efisiensi

tertinggi sebesar 5,56% pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0%. Namun semuanya masih masuk dalam kategori sangat efisien.

Tabel 7 Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pengumpulan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio	Kemampuan Finansial
2013	11.114.714.335,00	253.251.664.618,76	4,39%	Sangat Efisien
2014	10.206.781.875,00	302.207.051.218,57	3,38%	Sangat Efisien
2015	20.540.440.201,00	369.060.712.118,63	5,57%	Sangat Efisien
2016	23.065.607.801,00	426.484.851.696,80	5,41%	Sangat Efisien
2017	23.637.841.250,00	553.610.032.994,03	4,27%	Sangat Efisien
2018	24.018.545.399,00	558.329.598.200,97	4,30%	Sangat Efisien
2019	28.268.716.600,00	652.563.113.786,75	4,33%	Sangat Efisien
2020	0,00	596.316.675.898,77	0,00%	Sangat Efisien
2021	-	672.462.837.506,00	-	-
2022	-	767.658.224.719,40	-	-
Rata-rata	17.606.580.932,63	515.194.476.275,87	3,96%	Sangat Efisien

Sumber: [10]

Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Kontribusi usaha lokal terhadap pendapatan daerah dipahami melalui perhitungan rasio ini, yang menghitung hasil pengelolaan aset daerah secara individual dengan total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) [7]. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kontribusi BUMD Kabupaten Deli Serdang cenderung berfluktuasi selama periode 2013-2022. Rasio tertinggi mencapai 4,88% pada tahun 2018, dan terendah mencapai 1,48% pada tahun 2015. Rata-rata rasio derajat kontribusi BUMD daerah kabupaten Deli Serdang 2,74%.

Tabel 8 Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Laba BUMD	Realisasi PAD	Rasio
2013	13.960.019.593,00	328.348.147.362,35	4,25%
2014	9.959.571.858,00	433.885.507.125,82	2,30%
2015	7.611.631.987,00	515.293.681.488,42	1,48%
2016	17.259.675.200,00	573.010.351.004,96	3,01%
2017	20.064.116.991,00	849.286.151.151,13	2,36%
2018	35.636.472.727,00	729.648.594.488,68	4,88%
2019	22.017.441.824,00	825.375.281.296,75	2,67%
2020	16.190.194.281,00	809.719.829.264,82	2,00%
2021	22.228.003.613,00	926.137.759.153,33	2,40%
2022	21.867.448.711,00	1.041.732.670.188,21	2,10%
Rata-Rata	18.679.457.678,50	703.243.797.252,45	2,74%

Sumber:[10]

PEMBAHASAN

Pada tahun 2016-2020, tingkat pendidikan di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan, sementara tingkat kemiskinan menurun. Namun, pada tahun 2021, pendidikan menurun dan kemiskinan meningkat. Pada tahun 2022, tingkat pendidikan kembali meningkat dan kemiskinan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan; semakin tinggi pendidikan, semakin rendah kemiskinan. Masyarakat dengan pendidikan rendah kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang mengakibatkan kemiskinan. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, sehingga mengurangi kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2019). Rasio kemandirian keuangan daerah Deli Serdang tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan, terlihat dari data PAD yang meningkat tetapi kemiskinan juga meningkat pada tahun 2015, 2016, dan 2021, serta PAD yang menurun pada tahun 2018 dan 2020 diikuti oleh

penurunan kemiskinan (Iswara & Indrajaya, 2011). Selain itu, rasio efektivitas PAD tidak mempengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah Deli Serdang, meskipun rasio efektivitas meningkat, kontribusi PAD tetap rendah (Alokasi et al., 2016). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Deli Serdang dalam kategori rendah sekali, menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 74,28% selama periode 2013-2022 (Silampari, 2010). Rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 21,90% juga menunjukkan indikator rendah (Christina Irwati Tanan, 2018). Rata-rata rasio efektivitas PAD dan pajak daerah sebesar 69,22% dan 73,86% menunjukkan ketidakefektifan dalam pengumpulan PAD, dengan rasio efisiensi PAD sebesar 4,35% dalam kategori sangat efisien (Yakub et al., 2022; Silitonga et al., 2022). Kontribusi BUMD terhadap PAD cukup tinggi dengan rata-rata rasio 2,74%, namun belum mampu membuat keuangan Deli Serdang mandiri (Christina Irwati Tanan, 2018).

5. Kesimpulan

Dari hasil riset, rata-rata rasio finansial Kabupaten Deli Serdang selama 2013-2020 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah sangat rendah dengan nilai 3,18%, sementara ketergantungan daerah pada keuangan pusat tergolong sedang dengan nilai 68,12%. Ini menunjukkan perlunya peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Rasio desentralisasi fiskal selama sepuluh tahun adalah 22,47%, tergolong sedang. Rasio efektivitas PAD tergolong tidak efektif dengan nilai 76,25%, dan rasio efisiensi PAD sangat tidak efisien dengan nilai 225,04%. Efektivitas pajak daerah juga tidak efektif dengan nilai 73,86%, tetapi efisiensi pajak daerah sangat efisien dengan nilai 2,12%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Purba and K. Purba, "Tata Kelola Pemerintahan Pusat Dalam Pengembangan Kabupaten Tapanuli Utara," *J. Media Ris. Akuntansi, Audit. Inf.*, vol. 22, no. 2, pp. 171–190, 2022, doi: 10.25105/mraai.v22i2.15103.
- [2] Who, "Stunting in a nutshell," Who. [Online]. Available: <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>
- [3] A. Maria Martiani, Ani Margawati, Maria Mexitalia, Farid Agung Rahmadi, Etika Ratna Noer, Syauqy1, "Asupan Zat Besi Berhubungan dengan Perkembangan Anak," *Sari Pediatr.*, vol. 23, no. 2, pp. 95–102, 2021.
- [4] K. Badan Pusat Statistik Deli and S. Tahun, "Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebesar," pp. 1–8, 2021, [Online]. Available: <https://deliserdangkab.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/289/kemiskinan-kabupaten-deli-serdang-2021.html>
- [5] S. Bps, "Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2018-2020." [Online]. Available: <https://sumut.bps.go.id/indicator/26/77/2/rata-rata-lama-sekolah.html>
- [6] C. T. Putrianti, "Data Penduduk DeliSerdang." [Online]. Available: <https://portal.deliserdangkab.go.id/wp-content/berkas/1680248702.pdf>
- [7] D. A. M. Siswanto, "Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," vol. 11, no. 1, pp. 130–138, 2022.
- [8] I. M. Silitonga, S. B. Siahaan, and S. Purba, "Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat," *J. Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 222–235, 2022, doi: 10.37932/ja.v11i2.607.
- [9] S. Purba, "Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 11, no. 1, 2022, doi: 10.37641/jiakes.v11i1.1547.
- [10] Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Utara (BPK), "Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)." 2024.